

# Sistem Informasi Kependudukan dan Bantuan sosial (KBS) di Binjai Utara

<sup>1</sup>Muhammad Reendy Prayoga, <sup>2</sup>Hanna Willa Dhany, <sup>3</sup>Melva Sari Panjaitan

<sup>1, 2, 3</sup> Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

<sup>1</sup>reendyprayoga8@gmail.com, <sup>2</sup>hdhany@dosen.pancabudi.ac.id, <sup>3</sup>melva@dosen.pancabudi.ac.id

**Submit** : 11 Jun 2025 | **Diterima** : 18 Jun 2025 | **Terbit** : 19 Jun 2025

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Sistem Informasi Kependudukan dan Bantuan Sosial (KBS) di Kecamatan Binjai Utara serta dampaknya terhadap efektivitas pelayanan publik dan penyaluran bantuan sosial. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada kebutuhan akan sistem yang terintegrasi guna meningkatkan akurasi data kependudukan dan ketepatan sasaran dalam distribusi bantuan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan KBS di Binjai Utara telah membantu mempercepat proses administrasi, meningkatkan transparansi, dan meminimalisir kesalahan dalam pendataan penerima bantuan sosial. Namun demikian, masih terdapat kendala berupa keterbatasan infrastruktur teknologi dan rendahnya literasi digital di tingkat masyarakat. Kesimpulannya, sistem KBS merupakan solusi yang efektif untuk mendukung pelayanan publik berbasis data, namun membutuhkan dukungan penguatan kapasitas SDM dan infrastruktur untuk optimalisasi pelaksanaannya.

**Kata kunci:** Sistem Informasi, Kependudukan, Bantuan Sosial, KBS, Binjai Utara

## PENDAHULUAN

Pembangunan nasional yang merata dan berkeadilan memerlukan data kependudukan yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi. Di era digital seperti saat ini, pengelolaan data kependudukan secara manual dinilai tidak lagi efisien, baik dari segi waktu, tenaga, maupun ketepatan data. Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut untuk mengembangkan sistem informasi yang dapat mengelola data kependudukan secara lebih efektif dan terstruktur. Salah satu inovasi yang muncul sebagai respons terhadap kebutuhan tersebut adalah penerapan Sistem Informasi Kependudukan dan Bantuan Sosial (KBS).

KBS merupakan sistem berbasis digital yang dirancang untuk menghimpun, mengelola, dan menyajikan data penduduk sekaligus mengintegrasikannya dengan penyaluran bantuan sosial. Di Kecamatan Binjai Utara, penerapan sistem ini diharapkan mampu mempermudah proses pendataan dan distribusi bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan. Hal ini sangat penting mengingat program bantuan sosial sering kali mengalami hambatan akibat kurangnya validasi data, duplikasi penerima manfaat, hingga keterlambatan distribusi. (Simanjuntak, 2022)

Penerapan Sistem Informasi KBS di Binjai Utara menjadi salah satu bentuk upaya Pemerintah Kota Binjai dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi. Dengan integrasi antara data kependudukan dan sistem bantuan sosial, pemerintah dapat mengambil kebijakan yang lebih tepat sasaran, efisien, dan responsif terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, kajian terhadap implementasi dan efektivitas sistem ini menjadi sangat relevan untuk dilakukan, terutama dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. (Puspita, 2023).

Di Binjai Utara, seperti di banyak daerah lain di Indonesia, sering terjadi ketidaktepatan dalam penyaluran bantuan sosial, seperti data ganda, data tidak valid, atau penerima yang tidak tepat sasaran. Dengan adanya KBS, seluruh data kependudukan dapat terintegrasi secara digital dan terkini, sehingga proses verifikasi dan validasi penerima bantuan sosial menjadi lebih mudah dan akurat.

Sistem manual cenderung lambat dan rentan terhadap manipulasi. KBS memungkinkan

pemerintah kelurahan maupun kecamatan untuk bekerja secara lebih efisien dan transparan, karena semua data tercatat secara digital dan dapat dipantau langsung oleh pihak berwenang serta masyarakat jika dibuka secara publik. (Siregar, 2024). Dengan data yang real-time dan terintegrasi, pemerintah daerah dapat melakukan analisis sosial ekonomi penduduk dengan lebih baik. Hal ini sangat penting dalam merancang program bantuan, subsidi, maupun pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat.

Tanpa sistem yang terkoordinasi, satu keluarga bisa saja menerima beberapa jenis bantuan dari program yang berbeda, sementara keluarga lain yang lebih membutuhkan justru tidak menerima apa pun. KBS memungkinkan penyelarasan antarprogram bantuan untuk menjamin pemerataan. Pemerintah pusat mendorong daerah untuk melakukan transformasi digital dalam pelayanan publik. KBS merupakan salah satu langkah menuju e-government di Binjai Utara, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan dan sosial secara menyeluruh. Dalam kondisi darurat seperti pandemi, banjir, atau inflasi harga kebutuhan pokok, pemerintah membutuhkan data cepat untuk memberikan bantuan. KBS memungkinkan penyaluran bantuan secara cepat karena data sudah siap pakai dan tersusun dengan baik.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Sistem Informasi

Menurut Jogiyanto (2017), sistem informasi adalah suatu sistem yang terdiri dari kombinasi antara manusia, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, dan sumber daya data yang mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan pengendalian dalam organisasi. Dalam konteks pemerintahan daerah, sistem informasi menjadi alat penting dalam mempercepat pelayanan publik dan meningkatkan efisiensi birokrasi.

### Sistem Informasi Kependudukan

Sistem informasi kependudukan adalah sistem yang dirancang untuk mengelola data penduduk, seperti nama, usia, alamat, status keluarga, dan data demografis lainnya. Menurut Kementerian Dalam Negeri, sistem informasi ini digunakan untuk mendukung administrasi kependudukan, perencanaan pembangunan, serta penyelenggaraan pelayanan publik yang berbasis data. Di daerah seperti Binjai Utara, sistem ini menjadi dasar utama dalam penyusunan program sosial dan distribusi bantuan.

### Bantuan Sosial (Bansos)

Bantuan sosial adalah bentuk intervensi pemerintah kepada masyarakat miskin, rentan, atau terdampak kondisi tertentu, berupa uang atau barang, yang bersifat sementara dan tidak terus-menerus. Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai, bantuan sosial bertujuan untuk meringankan beban ekonomi masyarakat serta menjamin hak dasar warga negara.

### Integrasi Sistem Informasi dan Bantuan Sosial

Integrasi antara sistem informasi kependudukan dan sistem bantuan sosial bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan tepat sasaran dan efisien. Sistem ini memanfaatkan teknologi informasi untuk menghubungkan data demografis dengan kondisi sosial ekonomi penduduk. Dengan demikian, distribusi bantuan dapat dilakukan secara objektif, terpantau, dan minim penyimpangan.

### Teknologi Informasi dalam Pelayanan Publik

Menurut Laudon dan Laudon (2020), penggunaan teknologi informasi dalam organisasi publik dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Pemerintah daerah seperti Binjai Utara dapat memanfaatkan sistem informasi digital untuk menyajikan data yang akurat dan mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

## METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat, dan hubungan antara fenomena yang diteliti. Dalam konteks ini, penelitian akan mendeskripsikan bagaimana sistem informasi kependudukan dan bantuan sosial (KBS) diterapkan di Kecamatan Binjai Utara, serta dampaknya terhadap pelayanan publik dan distribusi bantuan sosial.

### Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

#### a. Data Primer

Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui:

1. Wawancara: Dilakukan dengan aparat pemerintah kecamatan, kelurahan, petugas operator KBS, dan masyarakat penerima bantuan sosial.
2. Observasi: Pengamatan langsung terhadap penggunaan sistem KBS di kantor kecamatan atau kelurahan serta proses pelayanan kepada masyarakat.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, laporan pelaksanaan bantuan sosial, arsip kependudukan, serta peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Peraturan Menteri Sosial dan Peraturan Daerah Kota Binjai.

### Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis menggunakan analisis kualitatif interaktif menurut Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga tahap:

1. Reduksi Data: Proses pemilihan, penyederhanaan, dan pengorganisasian data mentah yang relevan.
2. Penyajian Data: Menyusun data dalam bentuk narasi, tabel, atau matriks untuk memudahkan pemahaman.
3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi: Menyimpulkan hasil temuan berdasarkan data yang telah diolah dan diverifikasi ke lapangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

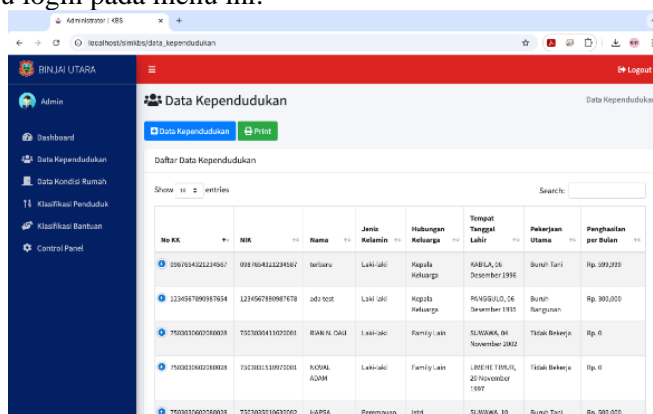
Implementasi Sistem Informasi Kependudukan dan Bantuan Sosial (KBS) di Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai. Hasil yang diperoleh merupakan rangkuman dari observasi lapangan, wawancara dengan pihak terkait, serta telaah dokumen yang relevan. Setiap temuan akan dianalisis dan dibahas secara mendalam berdasarkan landasan teori yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Pembahasan ini bertujuan untuk menggambarkan sejauh mana sistem KBS telah diimplementasikan, efektivitasnya dalam mendukung pendataan kependudukan dan penyaluran bantuan sosial, serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya di lapangan.



Cari Informasi Penerima Bantuan

Gambar 1 Menu Utama

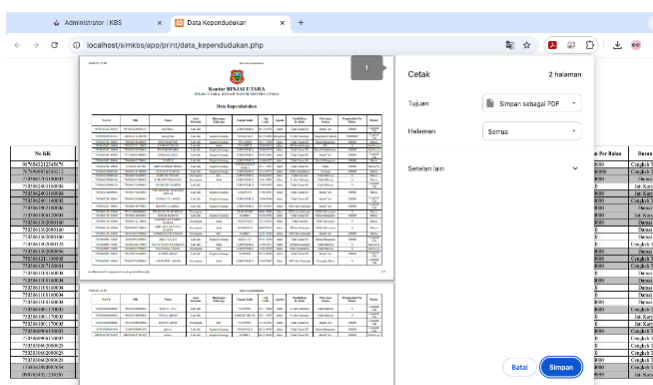
Menu beranda berisi menu-menu yang tersedia yaitu bansos, kependudukan dan kontak, admin juga dapat masuk ke menu login pada menu ini.



No KK	NIK	Nama	Jenis Kelamin	Hubungan Keluarga	Tempat Tanggal Lahir	Pekerjaan Utama	Penghasilan per Bulan
0007034322249567	001704122249567	Waharu	Laki-laki	Kepala Keluarga	KAB. LA. 04 Desember 1994	Buruh Tani	Rp. 399.999
1234567890123456	1234567890123456	adi not	Laki-laki	Kepala Keluarga	PANGSILU, 04 Desember 1910	Buruh Sanggahan	Rp. 300.000
7503035003500303	7503030411035003	RIAN N. DALI	Laki-laki	Family Lain	SULAWAK, 04 November 2002	Tidak Bekerja	Rp. 0
7503035003500303	7503030511035003	BOSAL ADAM	Laki-laki	Family Lain	LIRIKHE TIRUKU, 20 November 1999	Tidak Bekerja	Rp. 0
7503035003500303	7503030310035003	HAPSA	Perempuan	Istri	SULAWAK, 10	Buruh Tani	Rp. 300.000

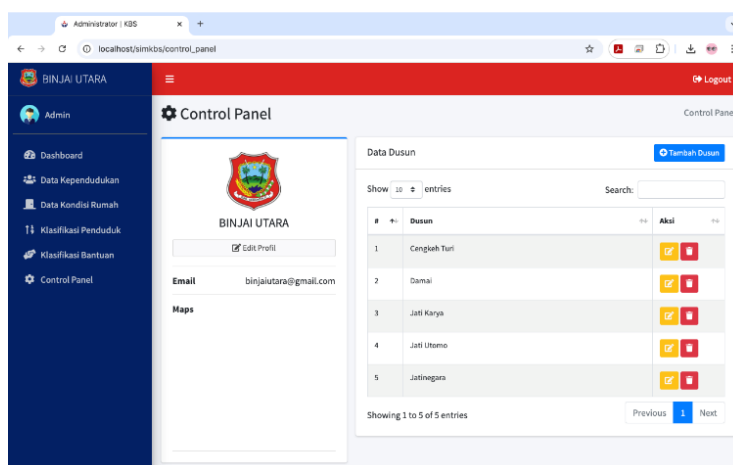
Gambar 2 Menu Data Kependudukan

Tampilan menu data kependudukan yang berisi data masyarakat yang ada pada daerah binjai utara.



Gambar 3 Menu Print

Tampilan menu print untuk dapat mencetak data kependudukan



#	Dusun	Aksi
1	Cengkeh Turi	[Edit] [Hapus]
2	Damai	[Edit] [Hapus]
3	Jati Karya	[Edit] [Hapus]
4	Jati Litome	[Edit] [Hapus]
5	Jatinagara	[Edit] [Hapus]

Gambar 4 Tampilan menu control panel

## KESIMPULAN

Penerapan sistem KBS di Binjai Utara telah membantu meningkatkan akurasi data kependudukan dan penyaluran bantuan sosial. Dengan adanya sistem yang terintegrasi, pemerintah kecamatan mampu memverifikasi dan memvalidasi data penerima bantuan secara lebih efisien dan tepat sasaran. KBS memberikan kontribusi positif dalam mendukung pelayanan publik berbasis digital. Sistem ini mempercepat proses administrasi, meminimalkan kesalahan manual, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan bantuan sosial. Terdapat beberapa kendala teknis dan non-teknis dalam pelaksanaan KBS, seperti keterbatasan infrastruktur digital, kurangnya pelatihan bagi operator sistem, dan rendahnya literasi digital masyarakat. Meskipun demikian, secara umum sistem KBS dipandang cukup efektif dan layak untuk terus dikembangkan. Pemerintah daerah perlu terus meningkatkan infrastruktur teknologi informasi, khususnya jaringan internet dan perangkat komputer di kantor kelurahan dan kecamatan, agar sistem KBS dapat berjalan optimal di seluruh wilayah. Pelatihan dan pendampingan teknis bagi petugas dan operator sistem KBS perlu ditingkatkan, guna memastikan kompetensi mereka dalam mengelola data dan menangani kendala teknis yang mungkin terjadi. Masyarakat perlu dilibatkan secara aktif dalam proses pendataan dan sosialisasi KBS, agar mereka memiliki pemahaman yang baik tentang pentingnya data kependudukan dan dapat berpartisipasi dalam menjaga keakuratan data. Perlu dilakukan evaluasi berkala terhadap sistem KBS, baik dari aspek teknis, administratif, maupun sosial, guna memastikan sistem tersebut terus relevan, adaptif, dan mampu menjawab tantangan kebutuhan masyarakat ke depan.

## REFERENSI

- Badan Pusat Statistik Kota Binjai. (2024). *Data Statistik Kecamatan Binjai Utara Tahun 2023*. Binjai: BPS Kota Binjai.
- Dhany, H. W. (2024). Heart attack prediction with SVM. *Prosiding Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Dharmawangsa*, 1(1), 233–240.
- Dhany, H. W., Izhari, F., & Saragih, M. D. A. (2024). Implementation of Android-based community health center examination reporting application using the waterfall method. *Journal of Science and Social Research*, 7(4), 1584–1590.
- Dhany, H. W., Permana, A. I., Izhari, F., Ginting, A. P., & Pratama, Z. G. (2024). Aplikasi prediksi serangan jantung untuk warga Kelurahan Pelawi Utara. *Jurnal Minfo Polgan*, 13(2), 2096–2101
- Gulo, J. A. S., Dhany, H. W. ., & Panjaitan, M. S. . (2025). Sistem Informasi Kepegawaian Pada PT Anugrah Argon Medica Berbasis Website. *Jurnal Minfo Polgan*, 14(1), 392-401. <https://doi.org/10.33395/jmp.v14i1.14737>
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2022). *Pedoman Pengelolaan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil Berbasis Digital*. Jakarta: Ditjen Dukcapil.
- Kementerian Sosial RI. (2023). *Laporan Tahunan Penyaluran Bantuan Sosial Tahun 2023*. Jakarta: Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial.
- Panjaitan, M. S. (2018). Model sistem pendukung keputusan penilaian kinerja dan reward pegawai melalui e-Office. *Jurnal Teknik dan Informatika*, 5(1), 36–39.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mekanisme Pendataan dan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Elektronik.
- Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Terpadu Kependudukan dan Bantuan Sosial (KBS).
- Puspita, R., & Ramadhani, A. (2023). "Pemanfaatan Sistem Informasi untuk Akurasi Data Penerima Bantuan Sosial di Daerah Perkotaan." *Jurnal Teknologi dan Informasi Publik*, 12(1), 44–53. <https://doi.org/10.31234/jtip.v12i1.1032>
- Rahmadani, F., & Santoso, D. (2022). "Pengembangan Sistem Informasi Kependudukan Berbasis Web untuk Mendukung Program Sosial Daerah." *Jurnal Sistem Informasi dan Komputer*, 10(3), 75–83.

- 
- Simanjuntak, E., & Nurhaliza, A. (2022). "Efektivitas Digitalisasi Layanan Kependudukan di Sumatera Utara: Studi Kasus Kota Binjai." *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Digital*, 5(2), 120–129.
- Siregar, M., & Hasibuan, R. (2024). *Transformasi Layanan Publik Berbasis Sistem Informasi di Sumatera Utara*. Medan: Universitas Negeri Medan Press.
- Yusuf, H., & Andini, L. (2025). "Evaluasi Pemanfaatan Sistem Informasi Bantuan Sosial di Kecamatan Perkotaan." *Jurnal Administrasi Publik Digital*, 3(1), 22–31.